

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH



PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2015 DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH: DELAPAN KABUPATEN/KOTA MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN

Semarang, 31 Mei 2016 – Hari ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 pada delapan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kota Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang. LHP tersebut berturut-turut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo, kepada Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga (Tongat) dan Bupati Purbalingga yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Kabupaten Purbalingga (Susilo Utomo), Ketua DPRD Kota Salatiga (Tedy Sulistio) dan Walikota Salatiga (Yuliyanto), Ketua DPRD Kabupaten Demak (Nurul Muttaqin) dan Bupati Demak yang diwakili oleh Sekretaris Kabupaten Demak (Singgih Setyono), Ketua DPRD Kabupaten Rembang (Majid Kamil) dan Wakil Bupati Rembang (Bayu Andrianto), Ketua DPRD Kota Magelang (Endy Darmawan) dan Wakil Walikota Magelang (Windarti Agustina), Ketua DPRD Kabupaten Cilacap (Taufik Nurhidayat) dan Bupati Cilacap (Tatto Suwanto Pamuji), Ketua DPRD Kabupaten Batang (Imam Teguh Raharjo) dan Wakil Bupati Batang (Soetadi), serta Ketua DPRD Kabupaten Pemalang (Agus Sukoco) dan Bupati Pemalang yang diwakili oleh Sekretaris Kabupaten Pemalang (Budhi Raharjo). Sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, *output* dari pemeriksaan keuangan adalah opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Penyerahan LHP kali ini merupakan tahapan kelima dari seluruh rangkaian acara penyerahan LHP LKPD TA 2015 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah dengan menguji asersi laporan keuangan, yaitu asersi keterjadian/keberadaan, penilaian, hak dan kewajiban, kelengkapan, serta pengungkapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk kedelapan Kabupaten/Kota tersebut. Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan yang masih menjadi pengecualian pada delapan kabupaten/kota tersebut diantaranya yaitu: kekurangan kas yang belum ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekurangan tersebut; terdapat piutang macet pada BUMD yang statusnya dalam proses penegak hukum sehingga belum dapat diketahui secara pasti jumlah yang terealisasi; terdapat aset tetap tanah yang tidak dapat diyakini kewajarannya, tidak diketahui keberadaannya, bersertifikat ganda, dan tidak dapat dibandingkan dengan Kartu Inventaris Barang; terdapat aset tetap peralatan dan mesin tidak dirinci unit, jenis dan jumlahnya, serta tidak diketahui keberadaannya; terdapat aset

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH



tetap jalan, irigasi dan jaringan yang belum dicatat; lemahnya pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan aset tetap tanah; serta lemahnya pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana BOS.

BPK mengharapkan bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset/keuangan daerah, para Bupati/Walikota beserta jajarannya supaya segera melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi yang dimuat dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan secara resmi diserahkan. Keberhasilan pemeriksaan BPK terletak pada bagaimana rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan laporan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan semester II tahun 2015, persentase tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi dari delapan kabupaten/kota tersebut antara 64,97% sampai 91,08%.